

# Perencanaan Penganggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu Di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT

Agustina Henukh\*

<sup>a</sup>SD Negeri Lotelutun, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rotenda, Provinsi NTT

<sup>b</sup>Pacasarjana, Universitas Negeri Semarang

\*Alamat Surel: agustinahenukh@yahoo.com

## Abstrak

Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: (1). Perencanaan anggaran (*Budgeting*) yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis. (2) Pelaksanaan (*implementation involves accounting*), yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) Pertanggung-jawaban (*auditing*), yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Penyusunan anggaran (penganggaran) berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Namun, kadang-kadang dari jumlah dana yang tersedia baru mulai menyusun rencana tentang bagaimana dana tersebut dihabiskan. Sering dalam perencanaan penganggaran kurang melibatkan stakeholder yang ada di sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Fokus penelitian yaitu perencanaan penganggaran pendidikan. Data yang dikumpulkan bersumber dari Kepala SD Negeri Lotelutun Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Data dikumpulkan pada Desember 2018. Simpulan dari penelitian ini adalah. Mekanisme perencanaan penganggaran telah dilakukan tapi belum maksimal. Sistem perencanaan anggaran, dalam hal ini dana BOS belum optimal di SD Negeri Lotelutun.

Kata kunci:

Perencanaan, penganggaran, Pendidikan, Manajemen Terpadu

© 2019 Dipublikasikan oleh Universitas Negeri Semarang

## 1. Pendahuluan

Manajemen Pembiayaan Pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan (pelaksanaan) dan pertanggung jawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi: (1). Perencanaan anggaran (*Budgeting*) yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis. (2) Pelaksanaan (*implementation involves accounting*) yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. (3) Pertanggung-jawaban (*auditing*), yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Pertanggungjawaban adalah proses pembuktian bahwa apa yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, hal ini meliputi pertanggungjawaban, penerimaan dana, penyimpanan dan pengeluaran dan sesuai perencanaan (proporsional).

Prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan pendidikan adalah: hemat, terarah, terbuka, menyeluruh, periodik, akuntabel, efektif dan efisien. Dari sekian banyak sumber daya pendidikan, uang merupakan salah satu komponen yang berperan sangat penting. Hal ini dikarenakan oleh asumsi bahwa keuangan atau pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Meskipun pendidikan tidak dapat dikatakan hanya bergantung pada uang atau pendanaan, tapi tanpa didukung oleh pendanaan yang memadai, maka proses

To cite this article:

Agustina Henukh (2019). Perencanaan Penganggaran Pendidikan Berbasis Manajemen Biaya Terpadu di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 910-914

pendidikan sulit diharapkan tercapai secara efektif. Uang (pendanaan) ibarat bahan bakar dalam sistem kerja sebuah mobil, yang mati hidupnya ditentukan oleh ketersediaan bahan bakar.

Uang dalam kaitannya dengan proses pendidikan, termasuk sumber daya yang sangat esensial dan sangat terbatas. Atas dasar asumsi inilah uang perlu dikelola (dimanage) secara efektif dan efisien agar tidak menghambat upaya mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Manajemen pembiayaan dalam lembaga pendidikan berbeda dengan manajemen perusahaan yang berorientasi profit atau laba. Organisasi pendidikan dikategorikan sebagai nir laba (non profit). Oleh karena itu manajemen pembiayaan memiliki keunikan sesuai dengan misi dan karakteristik pendidikan.

Dengan kenyataan tersebut maka penerapan peraturan dan sistem manajemen pembiayaan yang baku dalam lembaga pendidikan tidak dapat dipungkiri. Adapun persoalan yang berkaitan langsung dengan manajemen pembiayaan (pendanaan) pendidikan, antara lain : sumber dana yang terbatas, perencanaan pembiayaan program yang serampangan (tidak atau kurang proporsional), tidak sesuai dengan visi-misi dan kebijakan sebagaimana tertulis di dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi, lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata kelola (manajemen yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih, transparan dan kredibel dari berbagai penyelewengan yang merugikan lembaga pendidikan. Penyusunan anggaran (penganggaran) berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, kadang-kadang dari jumlah dana yang tersedia baru mulai menyusun rencana tentang bagaimana dana tersebut dihabiskan.

---

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan masalah tentang perencanaan penganggaran pendidikan berbasis manajemen biaya terpadu di SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Provinsi NTT. Waktu : Penelitian ini berlangsung bulan Oktober 2018. Tempat: Penelitian ini dilakukan di SD NEGERI Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT. Data yang dibutuhkan adalah data mengenai pola penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SD Negeri Lotelutun. Sumber data adalah Kepala SD Negeri Lotelutun Kecamatan Rote Barat Daya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (Sugiono, 2012:338-345), yaitu: Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema dan polanya serta dibuang yang tidak perlu. Display data yaitu menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Dalam penelitian ini data disederhanakan dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif dengan tipe studi kasus. Verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan dalam penelitian ini. Data yang telah disajikan kemudian disimpulkan

---

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Melalui wawancara, penulis menemukan data berdasarkan penetapan fokus penelitian pada bab 1. yaitu: perencanaan penganggaran berbasis manajemen biaya mutu terpadu. Fokus penelitian secara operasional dijabarkan melalui pertanyaan-pertanyaan berikut ini:

Bagaimana mekanisme perencanaan penganggaran (Budgeting) berbasis manajemen mutu terpadu di SD Negeri Lotelutun? Jawab Kepala Sekolah: "Kami menyusun RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah). Kami mengundang seluruh guru, tenaga operator, wakil dari orangtua peserta didik, dan komite sekolah untuk hadir dalam rapat penyusunan RKAS. Dalam menyusun RKAS ada faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan biaya pendidikan di SD ini adalah Faktor internal dan faktor eksternal. Bentuk perhatian dalam penyusunan RKAS terkait faktor internal adalah 20% dari dana BOS dianggarkan

untuk kesejahteraan guru, peningkatan kemampuan guru, pembelian buku-buku pelajaran, pembuatan meja dan bangku peserta didik, pembuatan pagar sekolah. Bentuk perhatian dalam penyusunan RKAS terkait faktor eksternal adalah Kepala Sekolah memperhatikan keadaan sosial ekonomi orang tua peserta didik yang kurang mampu dan tidak mendapatkan KIP dan KIS dari pemerintah maka pihak sekolah mengalokasikan dana BOS untuk 20 peserta didik, masing-masing Rp200.000 Sedangkan tentang aspirasi orang tua terkait pembiayaan adalah peserta rapat RKAS menetapkan secara bersama besar sumbangan /dana cendramata dari peserta didik yang tamat belajar (kelas VI).

Mengenai Pengalokasian dana yang diterima dapat dijawab oleh informan sebagai berikut: Kalau dana P4 untuk pemberian makanan tambahan bagi peserta didik, jadi pengalokasiannya khusus untuk pengadaan makanan. Sedangkan dana BOS, 20 % diperuntukan pengadaan buku pelajaran, 15% untuk honorarium, kurang lebih Rp4000.000 untuk peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dan tidak mendapat KIS dan KIP. Untuk Biaya transport ke kecamatan jika satu kali maka 1 x Rp50.000 dan transport ke kabupaten jika 1 kali maka 1 x Rp100.000. Biaya untuk perpindahan kelas VI yang tamat belajar diperoleh dari orang tua peserta didik. Biaya untuk hari-hari besar lainnya bersumber dari Kami guru-guru berkontribusi. Jika dana yang ada belum terpenuhi untuk membiayai program lain, Kami gunakan dana cendera mata sesuai keputusan rapat sebelumnya. Kami sudah rapat dengan orangtua peserta didik untuk sepakat, setiap peserta didik yang tamat menyumbang cendera mata dalam bentuk uang Rp 75.000 setiap lulusan. Jadi dana itu digunakan untuk program pembangunan pagar sekolah.

Bentuk desain anggaran yang diterapkan, Kami tidak menggunakan bentuk desain anggaran. Kami hanya menyusun RKAS. Penentuan sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan bersumber dari pemerintah dalam bentuk dana BOS berjumlah 100 Juta/tahun, dana P4 (4 - 5 juta per tahun), sedangkan dana dari orangtua yaitu dana perpindahan (cendramata dari setiap lulusan Rp75.000). Dana untuk perayaan hari raya kenegaraan dan gerejawi bersumber dari kontribusi guru-guru. Dana untuk acara perpindahan dari lulusan kelas VI ditanggung dan dikelola langsung oleh orang tua peserta didik.

Aspek berikut dari jawaban informan terkait penggunaan/pengalokasian perolehan biaya(dana) sebagai berikut: Kalau dana P4 untuk pemberian makanan tambahan bagi peserta didik, jadi pengalokasiannya khusus untuk pengadaan makanan. Sedangkan dana BOS, 20 % diperuntukan pengadaan buku pelajaran, 15% untuk honorarium, kurang lebih Rp4000.000 untuk peserta didik yang orang tuanya tidak mampu dan tidak mendapat KIS dan KIP. Untuk Biaya transport ke kecamatan jika satu kali maka 1 x Rp50.000 dan transport ke kabupaten jika 1 kali maka 1 x Rp100.000.

#### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan temuan data lapangan maka perlu dilakukan pembahasan di bawah ini.

Mekanisme perencanaan penganggaran telah dilakukan tapi belum maksimal. Seharusnya dalam perencanaan program yang baru perlu pertautkann dengan data waktu lalu. Bentuk desain anggaran yang digunakan, walaupun menurut jawaban Kepala Sekolah tidak menggunakan bentuk desain anggaran tapi sebenarnya bentuk desain yang digunakan adalah terkait dengan bentuk desain perbutir tapi kurang lengkap. Penentuan sumber-sumber pembiayaan sudah ditetapkan secara berulang karena sudah disesuaikan dengan sumber tetap dari pemerintah dan kondisi kemampuan orangtua siswa. Pengalokasian anggaran. Pengalokasian dana dari orangtua siswa dan dana P4 sudah tepat sasaran. Sedangkan pengalokasian dana BOS 15 % untuk kesejahteraan guru perlu sesuaikan dengan aturan/juknis dana BOS SD tahun 2018. Dalam Juknis menunjukan bahwa dana BOS diperbolehkan menggunakan maksimum 30 % untuk kesejahteraan guru yang berpendidikan S1 (Strata Satu). Tetapi faktanya dana 15 % digunakan untuk kesejahteraan bukan S1 maupun tenaga operator yang belum S1 di SD Negeri Lotelutun. Hal ini bertentangan dengan juknis dana BOS tahun 2019.

---

#### **4. Simpulan**

Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran (budget). Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran (penganggaran/budgeting) merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana

yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi. Pada dasarnya, penyusunan anggaran merupakan negosiasi atau perundingan/kesepakatan antara puncak pimpinan dengan pimpinan di bawahnya dalam menentukan besarnya alokasi biaya suatu penganggaran. Hasil akhir dari suatu negosiasi merupakan suatu pernyataan tentang pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana. Perencanaan penganggaran dilandasi prinsip-prinsip dan prosedur yang tepat. Kepala sekolah belum menerapkan perencanaan penganggaran berbasis manajemen mutu terpadu. Terutama dalam hal pemilihan bentuk desain anggaran yang digunakan. Pengalokasian penggunaan dana BOS belum sesuai juknis. Dalam penyusunan RKAS kepala sekolah telah melibatkan seluruh stakeholder sekolah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai saran dari penelitian ini adalah kepala sekolah sebagai seorang manager pendidikan tidak hanya paham tentang manajemen pendidikan secara umum tapi harus paham benar tentang konsep dan praktik penyusunan anggaran pendidikan. Manajer pendidikan harus melibatkan stakeholder dalam proses penganggaran pendidikan. Penyusunan anggaran(penganggaran) berangkat dari rencana kegiatan atau program yang telah disusun, kemudian diperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, bukan dari jumlah dana yang tersedia dan bagaimana dana tersebut dihabiskan. Kepala Sekolah hendaknya menggunakan bentuk desain anggaran per butir, karena desain ini lebih mudah penerapannya. Pengalokasian anggaran seharusnya disesuaikan dengan juknis dana BOS yang berlaku.

---

## Daftar Pustaka

- Blocher,E.J. Chen K.H.dan Lin T.W.2000.Manajemen biaya dengan tekanan strategi. Jakarta Salemba Empat
- Fattah ,Nanang 2002. Ekonomi dan pembiayaan pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Haryati, Sri. 2012. Pengembangan model manajemen pembiayaan sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Magelang. Disertasi Semarang, Program Pasca Sarjana Unnes
- Indardjo, Sihombing, Umberto. 2003. Pembiayaan pendidikan. Yogyakarta:UPP AMP YKPN
- Kurniady Dedy A. 2011. Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kab. Bandung Jurnal penelitian pendidikan, vol. 12 No.1 april 2011
- Muzamil. 2011. Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 1 Sulang Kabupaten Rembang Tesis PPS Unnes Semarang
- Rondi. Nur. 2011. Manajemen pembiayaan Pendidikan di MA Al Irsyad Gaja Kab. Demak.Tesis Semarang PPS UNNES
- Supriadi. Dedi. 2010. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah Bandung. Rosdakarya.
- 2003 Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Bandung. Rosdakarya.
- 2004 Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah.  
Bandung. Rosdakarya